



DOK/RM

PEMBANGUNAN: Pembenahan kelurahan terus dilakukan Pemkot Mojokerto.

Rp 1 Miliar Per Kelurahan

Pemkot Kembali Gelontor Bedah Kampung

MOJOKERTO – Upaya mekanik jumlah pengangguran dan memperbanyak lapangan pekerjaan terus dilakukan Disnakertrans Kota Mojokerto dengan Bedah Kampung. Anggaran sebesar Rp 7 miliar pun siap digelontorkan.

"Nantinya akan ada tujuh kelurahan yang akan menjadi sasaran. Masing-masing kelurahan mendapatkan anggaran khusus Rp 1 miliar," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Hariyanto, kemarin.

Tujuh kelurahan yang dituju merupakan kelurahan yang dirasa perlu pengembangan dari segi sarana, prasarana dan SDM. "Termasuk Kelurahan Kranggan, Prajurit Kulon, Blooto, Pulorejo, Balongsari, Mentikan dan Sentanan," tambahnya. Masyarakat akan

dipadatkaryakan di setiap lingkungan. "Sifatnya tidak kontraktual," terangnya.

Program Bedah Kampung yang telah berjalan selama dua tahun ini merupakan program tahunan. Tujuannya, membenahi daerah-daerah yang menjadi sasaran. Dan, titik pembenahan menampung usulan-usulan dari RT, RW dan tokoh masyarakat.

Latih Disabilitas Siap Kerja

Selain membuka program padat karya untuk menyikapi pengangguran, disnakertrans juga menyentuh disabilitas. Mereka disiapkan masuk dunia kerja. Salah satunya dengan memberikan pelatihan khusus terhadap mereka. Pelatihan kerja itu rencananya melibatkan pihak terkait lainnya.

Selain Pemkot Mojokerto, juga perusahaan, tenaga kerja disabilitas dan pihak *World Health Organization* (WHO) serta *International Labour Organization* (ILO).

"Pelatihan ini di dalamnya terdapat juga sosialisasi untuk kaum difabel mengenai gambaran kerja," ujar Hariyanto, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

Selain itu, program pelatihan yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah ini pun juga mendapat dukungan dari UNESCO. Hak para pekerja disabilitas pun diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan standar ILO. Yakni, penyandang disabilitas memiliki hak sipil dan politik yang sama seperti orang lainnya. Serta hak atas pendidikan, pelatihan vokasional, layanan konseling dan penempatan, hak untuk mengamankan dan mempertahankan pekerjaan atau untuk terlibat di dalam posisi yang berguna, produktif dan remuneratif. "Kami percaya bahwa pekerja yang memiliki ketidak sempurnaan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja seperti warga normal," tambahnya. (dan/abi)